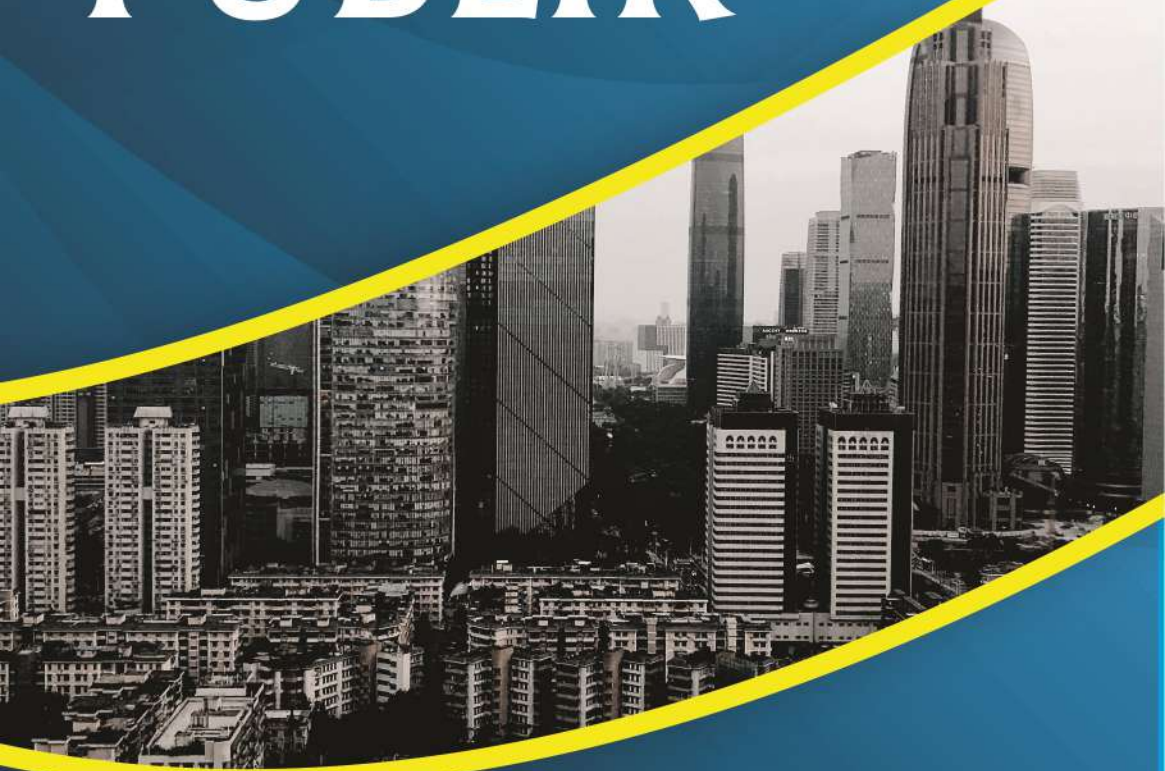




**MEMAHAMI PROSES,
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI**

KEBIJAKAN PUBLIK



Dr. Ratna Wati, S.E., M.M
Dr. Ir. Ika Sartika, M.T

**MEMAHAMI PROSES,
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
KEBIJAKAN
PUBLIK**

Dr. Ratna Wati, S.E., M.M

Dr. Ir. Ika Sartika, M.T

MEMAHAMI PROSES, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Ratna Wati, Ika Sartika

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Elan Jaelani

ISBN:

978-623-500-467-9

Cetakan Pertama:

Oktober, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

SAMBUTAN

Prof. Dr. Muh. Iham, M.Si.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera untuk Kita Semua, Salam Kebajikan.

Buku dengan berjudul “Memahami Proses, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik” yang ditulis oleh Dr. Ratna Wati, S.E., M.M dan Dr. Ir. Ika Sartika M.T. menyajikan uraian sebuah proses dan implementasi yang bermuara pada evaluasi kebijakan. Sehingga sangat mempermudah pembaca dalam mencerna apa itu Kebijakan Publik.

Pemahaman tentang kebijakan publik sedemikian penting, baik bagi para akademisi, praktisi maupun masyarakat umum untuk berbagai kepentingan. Dengan hadirnya buku ini, Dr. Ratna Wati, S.E., M.M dan Dr. Ir. Ika Sartika M.T. berupaya membantu pembaca untuk memahami teori, maupun implementasi kebijakan publik secara proses, implementasi dan evaluasi serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, setiap orang yang mendalami bidang ilmu kebijakan publik akan menjadi *role model* dalam implementasi kebijakan publik di ranah praktis.

Kehadiran buku ini diharapkan mempermudah para pembaca yang sedang mendalami teori kebijakan publik, ataupun secara aktif terlibat dalam implementasi kebijakan publik, sehingga ilmu dan praktek kebijakan publik ini dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada masyarakat era *Revolusi Industri 4.0* dan *Smart Society 5.0*.

Sebagai penggemar pemahaman tentang kebijakan publik, saya percaya bahwa kehadiran buku Kebijakan Publik yang ditulis oleh Dr. Ratna Wati, S.E., M.M dan Dr. Ir. Ika Sartika M.T. ini akan mudah dicerna, karena menggunakan gaya bahasa sederhana, disertai dengan contoh empiris yang sesuai realitas praktis di lapangan.

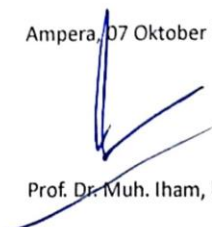
Sebagai seorang guru besar yang pernah bekerja bersama Dr. Ratna Wati, S.E., M.M dan Dr. Ir. Ika Sartika M.T. dalam berbagai hal, saya merasa bangga dan berterima kasih atas usaha besar yang telah dilakukan, sehingga buku ini dapat diterbitkan dan akan menjadi salah referensi utama dalam bidang ilmu kebijakan publik oleh *civitas* akademik pada perguruan tinggi di Indonesia bahkan dunia.

Milikilah buku ini untuk melengkapi referensi Kebijakan Publik Anda, dan selamat membaca!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan.

Ampera, 07 Oktober 2024



Prof. Dr. Muh. Iham, M.Si.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Memahami Proses, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Memahami Proses, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan para pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Oktober, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP DAN LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Pengertian dan Hakikat Kebijakan Publik	1
B. Bentuk dan Tujuan Kebijakan Publik	2
C. Prinsip-prinsip Kebijakan Publik	4
D. Aspek-aspek Penting dalam Kebijakan Publik	4
E. Lingkup Kebijakan Publik	5
BAB 2 CIRI-CIRI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK	11
A. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	11
B. Tujuan Kebijakan Publik	15
BAB 3 KRITERIA PENENTUAN KEBIJAKAN PUBLIK	23
A. Arti Pentingnya Studi Kebijakan Publik	29
BAB 4 MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK	37
A. Pengertian Model Kebijakan	37
B. Macam-Macam Model Kebijakan.....	42
C. Model-Model Perumusan Kebijakan Publik	46
BAB 5 AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK	49
A. Peran Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik.....	49
BAB 6 IDENTIFIKASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK	55
A. Karakteristik Masalah Kebijakan	55
B. Perumusan Masalah Sebagai Inti Kebijakan Publik	61
C. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah.....	62
BAB 7 PROSES ATAU TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK	69
A. Penyusunan Agenda	69
B. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan	73
BAB 8 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	79
A. Implementasi Kebijakan	79
BAB 9 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	91
A. Evaluasi Kebijakan Publik.....	91
B. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik	92
C. Jenis Evaluasi Kebijakan Publik.....	93
D. Model Evaluasi Kebijakan Publik	94
E. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Tidak Tercapainya Tujuan Kebijakan.....	95

BAB 10 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK..	101
A. Memahami Peran masyarakat.....	101
B. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik	104
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB 1

KONSEP DAN LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENGERTIAN DAN HAKIKAT KEBIJAKAN PUBLIK

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan dan memperbaiki sistem dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan dilaksanakan oleh berbagai masyarakat yang mempunyai kepentingan dan memiliki kesinambungan dengan tujuan tertentu. Aktivitas pembangunan yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak swasta dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Menurut Tachjan di (Herdiana, 2018) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Untuk menciptakan pembangunan yang optimal, pemerintah menciptakan beberapa kebijakan yang nantinya digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan utama dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Lahirnya suatu kebijakan publik tidak lain karena ada landasan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Tidak lain kegunaan kebijakan publik diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pada awal kebijakan ditetapkan oleh para pihak (stakeholders) (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Kebijakan publik oleh (Anggara, 2014) diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah

BAB 2

CIRI-CIRI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik harus mengikuti reformasi yang berakar pada aspek kebijakan publik. Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan atas dasar kepentingan publik. Selain itu juga untuk menentukan pencapaian tujuan kebijakan agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Tentu saja, perumusan kebijakan didasarkan pada evaluasi kebijakan masa lalu. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan kelanjutan dari kebijakan yang ada. Sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk menemukan pola yang cocok dan baik untuk kemaslahatan masyarakat. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada perbaikan kebijakan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi kebijakan.

Tidak setiap kebijakan diidentifikasi dengan segera. Kebijakan publik memerlukan tahapan-tahapan pengujian, penelitian, eksperimen, dan iterasi, sehingga kelemahan dan kekurangan kebijakan dapat diminimalisir. Pengujian dampak kebijakan juga merupakan indikator keberhasilan kebijakan publik yang berdampak positif yang dijadikan sebagai pilihan kebijakan. Aspek kerugian dan manfaat dari kebijakan harus dimunculkan sebagai akibat dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh diputuskan secara sembarangan, apapun keadaan dan situasinya, karena setiap kebijakan memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, Hugwood & Gunn berdasarkan dalam (Hayat, 2017) berpendapat bahwa kebijakan publik terdiri dari 10 definisi, yaitu:

1. Kebijakan sebagai merek bidang aktivitas tertentu (sebagai tanda aktivitas bidang); Branding atau penamaan kebijakan akan menjadi sebuah kontinum dan menjadi program rutin yang terstruktur dan tertanam dalam kebijakan.

BAB 3

KRITERIA PENENTUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik pada dasarnya suatu yang berlaku dan dinikmati oleh masyarakat luas dari hasil keputusan pemerintah melalui berbagai pertimbangan. Sehingga kebijakan tersebut bertujuan untuk menggiring masyarakat dalam suatu norma atau kebijakan yang berlaku. Kebijakan public memiliki arti dan makna yang beragam. Menurut Thomas R. Dye (1992) *public policy is whatever governments choose to do or not to do* (kebijakan public adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Sedangkan menurut Aminullah dalam Muhammadiyah (2001 : 371-372) Bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya atau tindakan tersebut bersifat strategis, berjangka Panjang, dan menyeluruh. Dapat di Tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur masyarakat dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan arti Kriteria menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kriteria Penentuan Kebijakan Publik dapat didefinisikan sebagai alat utama dalam menentukan suatu rancangan pemikiran demi terwujudnya kebijakan publik yang dapat diterima oleh masyarakat

Kebijakan publik yang menjadi suatu system untuk dilakukan masyarakat tentu menjadi objek utama pembahasan pada bab ini. Selain itu kita harus memahami terlebih dahulu tentang kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam menentukan kebijakan publik. Terdapat 6 kriteria yaitu ketertarikan publik, keadilan, efisiensi, dan efektifitas, cukup dan terjawab.

1. Ketertarikan Publik menjadi salah satu alternatif dalam penentuan kriteria kebijakan publik.

Masyarakat yang menjadi objek utama dalam penerapan kebijakan tersebut, tentu sangat diperlukan untuk memenuhi atau menjalankan suatu kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Sulit untuk meyakini bahwa

BAB 4

MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENGERTIAN MODEL KEBIJAKAN

Model dapat diartikan sebagai teori, proses berpikir dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Model kebijakan adalah teori kebijakan, dan karena itu dapat digunakan untuk menyelesaikannya masalah kebijakan. Memahami dan memahami kebijakan didasarkan pada itu dasar dari tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut, tidak ada kebijakan jika tidak dimaksudkan untuk membuat pengaturan yang baik sebagai bahan administrasi sekaligus sebagai mata pelajaran normatif. Berbicara tentang pengaturan, ini dilakukan dengan cara yang berbeda, bisa dengan pengaturan diikuti dengan paksaan, bisa juga dengan pengaturan yang hanya menguntungkan seseorang, sekelompok orang, atau untuk semua orang, tetapi jika semua cara dinilai untuk itu akan dapat memberi warna untuk setiap rumusan kebijakan (Winarno, 2012).

Dimensi terpenting dari kebijakan publik adalah praktis kebijakan. Di sini kebijakan publik dipandang sebagai aktivitas proses atau sebagai sistem terpadu terus bergerak dari satu bagian ke bagian lain, mendefinisikan dan membentuk satu sama lain (Mustari et al., 2015). Model juga dapat diartikan sebagai pendekatan. Oleh karena itu, setiap pendekatan tidak hanya menunjukkan satu pendekatan tertentu terhadap kebijakan tetapi juga dapat memenuhi banyak atau kombinasi dari beberapa pendekatan yang dirumuskan dalam suatu pendekatan tertentu. Pendekatan tersebut akan dapat membantu dalam memahami kehidupan pemerintahan, kehidupan politik, proses kebijakan, sistem kebijakan, analisis kebijakan, dan sistem pemerintahan. Dengan pendekatan yang digunakan akan melahirkan bentuk-bentuk (Faried, 2012).

Model adalah abstraksi dari kenyataan. Mustopa Didjaja merumuskan model sebagai penyederhanaan dari realitas masalah yang dihadapi, yang diwujudkan dalam hubungan kausal atau fungsional. Model dapat

BAB 5

AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. PERAN AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam perumusan kebijakan publik sudah pasti memiliki aktor yang merumuskan kewenangan yang ditetapkan. Para tokoh atau aktor ini memberikan pengaruh terhadap proses implementasi dengan cara yang digunakan secara masing- masing. Pada awal perumusan kebijakan pasti membutuhkan proses secara keseluruhan. Fase ini menentukan berhasil atau tidak penyusunan kebijakan publik untuk diterapkan di era selanjutnya. Setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pengambilan keputusan, namun pengambilan kebijakan membentuk berbagai macam cara dan strategi terhadap berbagai keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan masing- masing.

Selama masih dalam proses siklus kebijakan, masalah, usulan, dan tuntutan yang diungkapkan menjadi urusan pemerintah dan menjadi program pemerintah. Kebijakan publik mempunyai tiga komponen yang saling mempunyai keterkaitan dalam proses yaitu pelaku kebijakan, isi kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Beberapa tokoh politik menjelaskan bahwa proses dari perumusan kebijakan publik pasti mempunyai karakteristik untuk diperhatikan untuk mencapai tujuan. Menurut Ripley (1985) (Muadi et al., 2016) dijelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yakni :

BAB 6

IDENTIFIKASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. KARAKTERISTIK MASALAH KEBIJAKAN

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemerintah/instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan memenuhi tujuannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk juga jaringan dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Kesalahan atau kekurangan suatu kebijakan biasanya dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan.

Dalam hal keberhasilan kebijakan publik, suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik : pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

Pengembangan kebijakan publik perlu dilakukan secara proporsional dengan menggunakan analisis dan metode yang tepat sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang benar-benar dapat bermanfaat. Menghindari kebijakan publik yang justru kontra produktif dan menimbulkan banyak masalah baru. Kita tidak dapat menolak bahwa kebijakan publik tidak

BAB 7

PROSES ATAU TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENYUSUNAN AGENDA

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Di dalamnya terdapat ruang dimana terjadi pemaknaan apa yang disebut dengan masalah publik dan prioritas dalam agenda politik diperebutkan, dan jika sebuah isu mampu mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapat prioritas dalam agenda, maka isu tersebut mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu yang lainnya. Agenda merupakan pola perilaku pemerintah yang sifatnya spesifik. Ini dapat diartikan sebagai analisis tentang bagaimana suatu masalah dikembangkan, didefinisikan, dirumuskan, dan diselesaikan. Jika agenda penyusunan agenda dilakukan secara terbuka maka akan menguntungkan kelompok-kelompok yang kuat.

Namun, jika dilakukan secara tertutup akan menimbulkan kelemahan-kelemahan. Karena kebijakan publik sebagai upaya yang untuk memecahkan masalah publik, maka proses penyusunan kebijakan publik juga harus dimulai dari penyusunan agenda yang disusun berdasarkan partisipasi publik juga. Penyusunan agenda kebijakan selalu dipengaruhi oleh kondisi politik. Dalam agenda *setting* terdapat isu-isu kebijakan sebagai hasil dari silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. Isu kebijakan ada karena telah terjadi konflik atau “perbedaan persepsi” diantara para aktor atau suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Pengambil keputusan tidak menunggu sampai muncul tuntutan nyata dari publik.

Secara sistematis dapat menangani peristiwa dalam masyarakat beserta segala efeknya dan memasukkannya dalam agenda kebijakan. Sisi negatifnya adalah beban pemerintah menjadi sangat tinggi. Pemerintah terpaksa fokus pada salah satu tuntutan yang dilakukan oleh publik. Kegiatan individu atau kelompok lain berarti akses ke partisipasi dalam definisi masalah, akses ke partisipasi untuk mengatur dukungan masalah, dan akses ke prioritas yang

BAB 8

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi adalah salah satu elemen penting dalam mewujudkan terwujudnya suatu gagasan. Seseorang atau pelaku pemerintahan harus menerapkan atau mengimplementasikan suatu ide agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Implementasi merupakan proses yang ditempuh atau dilaksanakan diberbagai bidang tanpa adanya batasan apapun. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu program, maka perlu adanya kesiapan atas semua keperluan di lapangan. Implementasi sering diremehkan, dianggap hanya pelaksanaan dari program-program yang telah ditetapkan oleh para pembuat keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Implementasi kebijakan dianggap penting dan harus dilakukan. Seperti yang kita ketahui kebijakan tidak akan memberikan dampak apapun tanpa adanya penerapan atau pelaksanaan. Kebijakan hanya sebagai dokumen atau program yang tidak bermakna bagi kehidupan. Suatu kebijakan yang dinilai baik dan tepat pun tidak akan memberikan perubahan apapun bila tidak diimplementasikan.

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah aktivitas dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi suatu kebijakan memiliki peranan yang penting bagi jalannya proses pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang di dalamnya berisi tentang Langkah-langkah dan proses kegiatan. Dalam hal ini implementasi memiliki peranan yang penting dalam proses kebijakan dan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, tingkat keberhasilan dari suatu program dapat ditinjau dari seberapa maksimal implementasi kebijakannya.

BAB 9

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Evaluasi pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan yang akan digunakan untuk memprediksi, menghitung dan memantau pelaksanaan program di masa yang akan datang agar jauh lebih baik. Dengan demikian, evaluasi lebih melihat ke depan daripada kesalahan masa lalu, dan diarahkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program. Evaluasi adalah upaya untuk mengukur dan mengevaluasi secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan. Hasil evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik terhadap perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang (Yusuf, 2000).

Istilah evaluasi memiliki arti terkait, yang masing-masing mengacu pada penerapan berbagai ukuran nilai pada hasil kebijakan dan program. Secara umum, istilah 'evaluasi' disamakan dengan evaluasi, penilaian, dan perkiraan kata-kata yang menyatakan upaya menganalisis hasil kebijakan dalam satuan nilai. Dalam pengertian yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai dalam kenyataan, itu karena berkontribusi pada tujuan atau sasaran, dalam hal ini kebijakan atau program dikatakan telah mencapai tingkat kinerja yang berarti, yang berarti bahwa masalah kebijakan telah diselesaikan. diklarifikasi atau diselesaikan (Dunn, 2000).

Tidak ada kebijakan publik yang dapat dikeluarkan tanpa evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam mempertanggungjawabkannya kepada publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan. Outcome dari kebijakan dikatakan memiliki nilai karena outcome tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran, dengan kata lain kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat

BAB 10

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

A. MEMAHAMI PERAN MASYARAKAT

Teori peran adalah teori yang digunakan dalam sosiologi, psikologi, dan antropologi dan merupakan campuran dari berbagai teori, pendekatan, dan disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah ‘peran’ yang umum digunakan dalam dunia teater, dimana dalam teater seorang aktor harus memainkan karakter tertentu dan dalam posisinya sebagai karakter diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu. Kedudukan aktor dalam teater sama dengan kedudukan individu dalam masyarakat, dan keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Peran didefinisikan sebagai karakterisasi yang dilakukan aktor dalam sebuah drama, yang didefinisikan dalam konteks sosial sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika dia memegang posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batas yang ditetapkan oleh aktor lain, yang kebetulan berada dalam kinerja/akting peran yang sama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang sikap dan perilaku seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dalam kaitannya dengan kehadiran orang lain yang berhubungan dengan seseorang atau aktor. Aktor menjadi sadar akan struktur sosial yang ditempatinya, sehingga aktor selalu berusaha tampil “berkualitas” dan dipersepsikan oleh aktor lain “tidak menyimpang” dari sistem ekspektasi yang ada di masyarakat (Wirawan, 2015).

Peran adalah aspek dinamis dari suatu pekerjaan atau prestise, seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah memenuhi suatu peran. Peran menurut Kozier Barbara adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan posisinya dalam sistem. Peran menunjukkan fungsi modifikasi, dan sebagai proses. Peran yang dimiliki seseorang meliputi tiga hal, antara lain:

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 37,57. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan publik*. Jakarta: penerbit salemba humanika
- Affan, I. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA: Jurnal Lmu Hukum*, 6(1), 127–138. [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume 6 N](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume%206%20N)
- Affrian, R. (2012). Kebijakan publik by Eko Handoyo. Semarang: Widya Karya, 323.
- Agustino, Leo. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. ALFABETA
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1.
- Alaslan, A. (2021). Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar. In CV. Pena Persada (Vol. 53, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik*. Pustaka Setia.
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah. *CosmoGov*, 2(2), 220.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dwiyowiyoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Dwi Ma'rufah, K., & Sholichah, N. (2018). Implementasi Program “Berkas Mlaku Dewe” Dalam Meningkatkan Pelayanan Bidang Administrasi Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 237–254.

- Dye, Thomas R. (2011). *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Faried, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. PT Refika Aditama.
- Garut, U., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4, 25–43. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/jaeducation/article/view/3371/2332>
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*. <https://doi.org/10.2307/2619175>
- Haryadi, S. (2018). Ekonomi Bisnis Regulasi dan Kebijakan Telekomunikasi: Prinsip Penyusunan Kebijakan Negara di Bidang Telekomunikasi. *Open Science Framewor*, 1–13. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YTWMX>
- Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September 2017*, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Herdiana. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: pengertian dan konsep dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Kartawidjaja, D. H. A. D. (2018). *Kebijakan Publik, Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)* (Vol. 2).
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Jurnal Publiciana*, 11(1), 72–88.
- Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 216– 229.
- Mawaza, J. F., & Khalil, A. (2020). Masalah Sosial dan Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus UU ITE No. 19 Tahun 2016). *Journal of Governance Innovation*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i1.386>

- Mita, M. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/90>
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>
- Mustari, N. Ø, Ip, S., & Si, M. (2015). *Kebijakan Publik*
- Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Gramedia Jakarta
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (2013). Implementations. *Choice Reviews Online*, 50(11), 50-5912-50–5912. <https://doi.org/10.5860/choice.50-5912>
- Pujiwidodo, D. (2016). *ANALISIS PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK*. III(2), 2016.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Revide, Erika, Dkk. 2020. *Teori administrasi publik*. Medan: yayasan kita menulis
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik*. SAH MEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=N1RtDwAAQBAJ>
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Taufik. (2017). *Studi jaringan aktor dalam perumusan kebijakan publik*. 2, 2. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/view/473>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=mHorEAAAQBAJ>

- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan publik*. Intermedia jakarta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan proses kebijakan publik*. Media pressindo Yogyakarta
- Winarno, B. (2012). *KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, PROSES, DAN STUDI KASUS)*. C A P S
- Wirawan, S. (2015). Teori Peran Sarlito Wirawan. *Digilibuinsby. Ac.Id*, 22–22.
- Yaw, A. La. (n.d.). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*.

MEMAHAMI PROSES, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK



Dr. Ratna Wati, S.E., M.M.

Penulis lahir di Lampung, 13 April 1979. Ratna merupakan seseorang yang konsisten dalam dunia pengetahuan. Hal itu tampak dari proses akademik yang telah dilalui mulai tahap yang paling dasar hingga sukses meraih gelar doktor sekarang ini. Ratna merupakan alumni dari SDN 1 Tanjung Karang yang lulus tahun 1991. Ia melanjutkan studi di SMPN 7 Tanjung Karang dan berhasil lulus pada tahun 1994. Sekolah tingkat atasnya ditempuh di SMAS AL - Kautsar Lampung dan ia sukses lulus tahun 1997. Tanpa jeda yang lama, ratna melanjutkan studinya pada jenjang sarjana di STIE Mulia Pratama lulus tahun 2002. Gelar sarjana yang diperoleh tersebut juga dilengkapi dengan perolehan Akta IV di Unisma'45 Bekasi tahun 2009. Selanjutnya, untuk gelar magister ia peroleh dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta dan lulus tahun 2011 dan lulus S3 pada tahun 2022.



Dr. Ir. Ika Sartika, M.T.

Penulis lahir di Bandung, pada tanggal 1 Maret 1965, adalah dosen Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN. Ia menerima gelar pendidikan S-1 dari Teknik Industri ITB (1989), S-2 Teknik dan Manajemen Industri ITB (1998), Wadir Pasca S-3 dari Sekolah Arsitek, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB (2010), serta Short Course Effective Capacity Building for Public Officials from OIC Member States, Malaysia (2014). Ia juga memiliki sejumlah sertifikasi antara lain Sertifikat Kompetensi Penerapan Budaya Organisasi, Pengukuran Tingkat Produktivitas, dan Perencanaan Penyajian Pelatihan BNSP (2021). Dalam kariernya, ia memiliki banyak pengalaman profesional, di antaranya editor in chief di berbagai jurnal ilmiah dan narasumber Bimtek RPJMD di beberapa pemerintahan daerah kabupaten/kota. Ia juga aktif menjadi Ketua Tim Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan di Jakarta dan anggota tim kajian pembentukan beberapa kabupaten. penulis modul BRIDGE, pengajar pelatihan Direktorat Bina Pesisir KKP, pelatih TOT BRIDGE Tahap 2, serta Training Adviser Pemilu.



Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

Ekonomi - Rp. 66.900

ISBN 978-623-500-467-9

